



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA  
PEKANBARU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH  
(Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**DILA ARTIKA SARI**  
NIM : 11720424761

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1442 H /2021 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul “ *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki)*” yang ditulis oleh :

Nama : Dila Artika Sari  
 NIM : 11720424761  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 April 2021  
 Sya'ban 1442

Pembimbing Skripsi,

Haswir, M. Ag  
 NIP. 196911191996031002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (*Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki*) yang ditulis oleh :

Nama : **DILA ARTIKA SARI**  
 NIM : 11720424761  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Juni 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQSAH**

Ketua  
**Firdaus, SH., MH**

Sekretaris  
**Mu'rifah, SH., MH**

Penguji I  
**Dr. Alpi Syahrin, SH.,MH**

Penguji II  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

NIP. 19580712 198603 1 005

*(Handwritten signatures of the examiners)*





## ABSTRAK

**Dila Artika Sari (2021) : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki)**

Penelitian ini dibatasi mengenai jalur pejalan kaki berupa trotoar. Adapun lokasi tempat penelitian ini adalah di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana konsep dan pelaksanaan pembangunan jalur pejalan kaki berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru, Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru terhadap pembangunan jalur pejalan kaki, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru dalam pembangunan jalur pejalan kaki

Yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan pembangunan jalur pejalan kaki berupa trotoar di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru terdapat kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Realitanya terdapat pembangunan trotoar yang tidak merata. Walaupun trotoar di sebagian kawasan jalan tersebut sudah ada, namun tidak sesuai dengan ketentuan dan bahkan disalahgunakan fungsinya. Pembangunan jalur pejalan kaki berupa trotoar di suatu kawasan jalan provinsi merupakan tanggung jawab pemerintahan provinsi.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer yang dihimpun dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dan Pejalan Kaki. Sedangkan data sekundernya dari data-data yang penulis dapatkan dari referensi buku-buku pustaka, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis yang penulis gunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dan teknik sampling yang digunakan adalah *Accidental Sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam memberikan pembangunan jalur pejalan kaki berupa trotoar, tidak/ belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari ditemukannya beberapa kawasan jalan HR. Soebrantas yang tidak dilengkapi dengan trotoar atau tidak adanya pembaharuan dari pemerintah. Faktor penghambat yang menyebabkan tidak berjalannya pembangunan trotoar ini karena perencanaan yang tidak menyeluruh dan kurangnya ketersediaan anggaran dana, sehingga pembangunan trotoar di jalan HR. Soebrantas tidak terlaksana.

**Kata Kunci : Pelaksanaan UU LLAJ, Trotoar, Fiqh Siyasah (Siyasah Dusturiyah)**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi berjudul **“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqh Siyash (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki)”**.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Amri, ibunda tercinta Murniati, adik ke-1 saya Ayu Indriani, adik ke-2 saya Rian Andika dan adik ke-3 saya Indah Juni Anggraini yang telah memberikan bantuan materil, moril maupun spiritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. H. Suryan A. Jamrah, M.A Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pembangunan UIN Suska Riau, Bapak H. Kusnadi, M.Pd Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Suska Riau, dan Bapak Drs. H. Promadi, MA.,Ph.D selaku Wakil Rektor III Bidang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Suska Riau. Yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini,
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum bapak Drs. Hajar, M.Ag, Wakil Dekan I bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II bapak Dr. Wahidin, M.Ag, dan bapak Wakil Dekan III Dr.H. Maghfirah, MA.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Irfan Zulfikar M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Haswir, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Penasehat Akademis (PA) penulis yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN SUSKA RIAU ibu Dra. Nurlaili, M.Si.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
7. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), terkhusus keluarga HTNS angkatan 17 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan. Semoga kekeluargaan kita tetap bersatu selamanya.
8. Untuk Sahabat, Teman-Teman HTN B, Rempong Squad ( Vivin Nabila, Eli Yarnur, Agripina Grishilda Lubis), Teman Kamar Kos ( Yulia Azizah S.), Liza Novita Sari, Robbiatul Adawiyah, Senior HTNS, dan Bayu Sutri Maisal salah seseorang yang sangat berjasa yang telah banyak membantu penulis baik dalam memotivasi dan memberi semangat.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 Untuk semua keluarga, sahabat, teman, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang namanya tak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas semuanya. Hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Amin ya robbal 'alamin.

Pekanbaru, 23 Juni 2021

Penulis,

**DILA ARTIKA SARI**  
**NIM.11720424761**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	vii
<b>DAFTAR TABEL</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Kota Pekanbaru	21
1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	21
2. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Pekanbaru	23
3. Visi dan Misi Kota Pekanbaru	27
B. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	28
1. Sejarah Umum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	28
2. Visi dan Misi	29
3. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	30
4. Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	39
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS UU NO. 22 TAHUN 2009 DAN FIQH SIYASAH</b>	
A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	40
B. Fiqh Siyasa	69





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Pelaksanaan Pembangunan Jalur Pejalan Kaki berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.....	80
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru terhadap Pembangunan Jalur Pejalan Kaki .....	94
C. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru dalam Pembangunan Jalur Pejalan Kaki .....	99

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	115

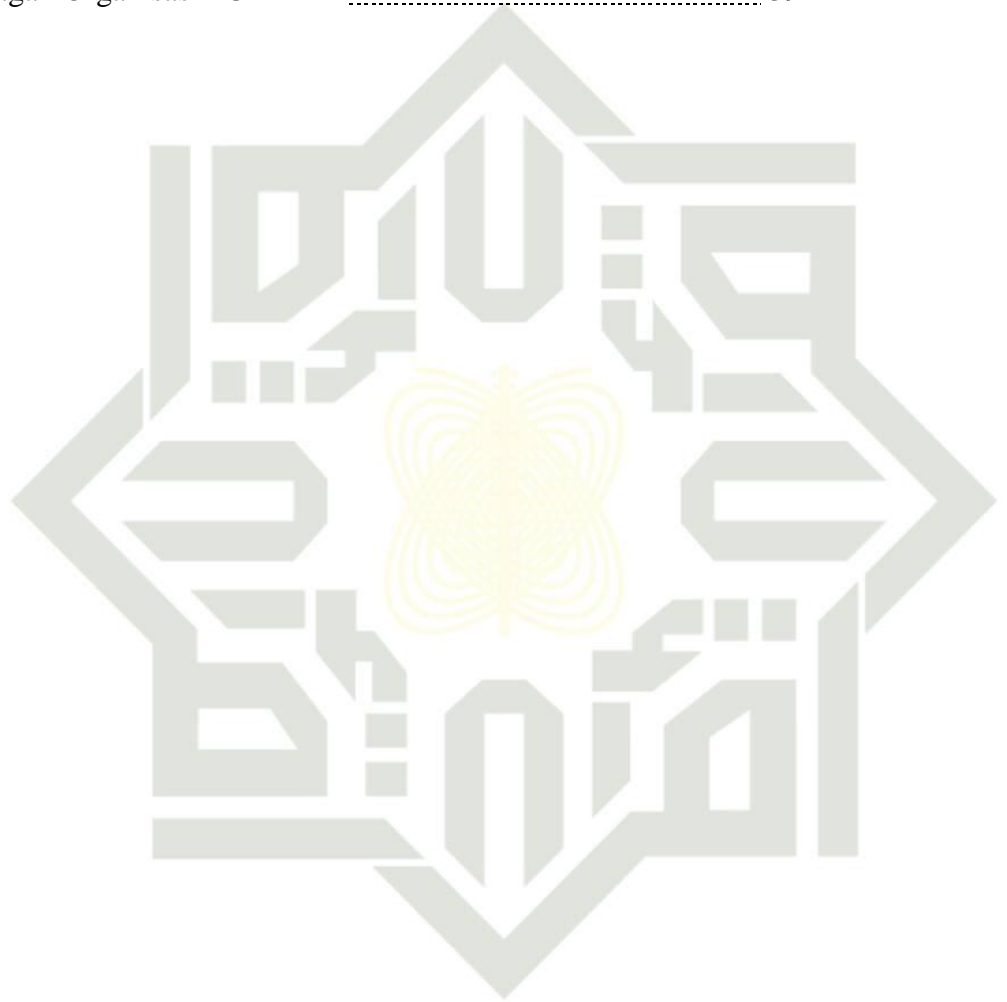


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar II. 1 Peta Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru .....	25
Gambar II. 2 Peta Wilayah Kota Pekanbaru .....	27
Gambar II. 3 Bagan Organisasi PUPRKPP .....	39



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel III. 1 Tingkat Pelayanan Trotoar.....	58
Tabel III. 2 Lebar minimum trotoar menurut penggunaan lahan.....	58
Tabel III. 3 Klasifikasi Jalan.....	59
Tabel IV. 4 Bangunan pusat kegiatan masyarakat di sepanjang Jalan Hr. Soebrantas.....	90



UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kota sebagai pusat kehidupan sebuah negara, maka harus disadari bahwa diperlukan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai demi menjangkau semua tempat yang dibutuhkan (pusat kegiatan) agar aktivitas masyarakat kota mampu berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Selain dari itu, Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan dan angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan Jalan adalah seluruh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Kemudian, Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>1</sup>

Setiap orang yang tinggal di sebuah negara tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Begitu pula mengenai hak pejalan kaki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hak adalah benar, kewenangan, milik, kepunyaan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya)<sup>2</sup>. Adapun hak yang dimaksud disini adalah hak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar bagi pejalan kaki, hak merasa aman dan hak merasa nyaman ketika menggunakan jalan.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau dan kota ini salah satu sentra ekonomi terbesar dibagian timur Pulau Sumatera dan termasuk sebagai kota dengan tingkat migrasi, urbanisasi, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 kecamatan yaitu Tampan (Binawidya), Payung Sekaki, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, dan Rumbai Pesisir yang

<sup>1</sup>Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

<sup>2</sup>Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mana telah mengalami kemajuan sehingga mengundang banyak orang untuk tinggal dan berusaha hidup didalamnya.<sup>3</sup>

Permasalahan dalam hal fasilitas pejalan kaki di kawasan perkotaan di Indonesia adalah belum terpenuhinya kebutuhan pejalan kaki, baik dari kualitas dan kuantitas. Pengembangan fasilitas pejalan kaki belum menjadi prioritas dibandingkan dengan pengembangan fasilitas moda transportasi lainnya, seperti Kendaraan Bermotor Angkutan Umum. Pejalan kaki memiliki hak untuk hidup di pusat-pusat perkotaan atau pedesaan berdasarkan dengan kebutuhan manusia, bukan hanya untuk kebutuhan kendaraan bermotor dan memiliki fasilitas untuk berjalan atau bersepeda.

Upaya demi kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki serta memperhatikan hak pejalan kaki, sudah dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan bahwa memberikan amanat kepada pemerintahan untuk melakukan pengelolaan jalan dan penyediaan fasilitas di jalan umum, karena pejalan kaki merupakan salah satu pengguna jalan. Oleh karena itu, pejalan kaki berhak mendapatkan jalur pejalan kaki demi keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam penggunaan ruang lalu lintas jalan.

Sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa:

Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

---

<sup>3</sup> Darmawati, *Determinasi Renstrasi Penduduk di Kota pekanbaru*, (Riau:2008) Jurnal Vol. VII No.2, hlm. 61-71



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Alat penerangan jalan;
- e. Alat pengendali dan dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan jalan.<sup>4</sup>

Selanjutnya, menurut Pasal 45 ayat (2) Penyediaan Fasilitas bagi

pejalan kaki di jalan umum, diselenggarakan oleh pihak pemerintah berdasarkan jenis jalannya menyatakan bahwa:

- a. Pemerintah untuk jalan nasional;
- b. Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
- c. Pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa;
- d. Pemerintah kota untuk jalan kota; dan
- e. Badan usaha jalan tol untuk jalan tol.<sup>5</sup>

Adapun penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai hak pejalan kaki Pasal 131 ayat (1) berbunyi:

”Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.”<sup>6</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga termuat dalam pasal 130 ayat

(2) menyatakan “Dilarang menggunakan trotoar diluar fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pejalan

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kaki dan/ atau pemakai jalan lainnya. Kemudian, di dalam pasal 131 ayat (1) menyatakan “fasilitas pejalan kaki terdiri dari: trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas, jembatan penyeberangan, terowongan penyeberangan.”<sup>7</sup>

Keberadaan sebuah undang-undang tentu saja untuk menjamin terciptanya sebuah aturan main yang jelas. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan juga dibuat untuk menciptakan sebuah kepastian dalam berlalu lintas, jangan sampai terjadi kekacauan karena tidak ada patokan dalam bertindak. Salah satu unsur yang diatur dalam berlalu lintas di jalan adalah terkait dengan para pengguna jalan.<sup>8</sup>

Seperti yang telah dijelaskan, pengguna jalan terdiri dari pejalan kaki, pengendara kendaraan tidak bermotor, pengendara kendaraan bermotor, pengguna angkutan umum, dan para pengguna jalan dengan keterbatasan. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjelaskan bagaimana aturan yang lebih detail untuk mengatur para pengguna jalan, dan juga memberikan perlindungan yang baik atau menyediakan fasilitas terhadap para pejalan kaki, pesepeda, dan para pengguna jalan dengan keterbatasan.

Mengenai keamanan pejalan kaki, sudah diatur di dalam Pasal 106 ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 02 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>8</sup> Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendaraan di Jalan Raya, Raih Asas Sukses*, (Penerbit Swadaya Grup, 2010), hlm. 15

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kendaraan bermotor di jalan, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Jika melanggarnya maka akan mendapatkan hukuman berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda 500.000,00 sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 284.

Kenyataannya, adanya aturan yang sudah mengatur tentang penyediaan jalur pejalan kaki tersebut, masih belum terealisasi atau terlaksanakan di Jalan HR. Soebrantas tepatnya di Kecamatan Binawidya yang sebelumnya bernama Kecamatan Tampan. Masih terdapat berbagai kawasan yang tidak dilengkapi trotoar. Jika dilihat dari lokasi jalan tersebut, merupakan jalan lalu lintas umum yang sebagai jalan protokol atau jalan utama Kota Pekanbaru. Namun, pembangunan jalur pejalan kaki berupa trotoar tidak banyak tersentuh oleh pihak pemerintah. Sebagian kawasan Jalan HR. Soebrantas tidak memiliki jalur pejalan kaki berupa trotoar. Kalau pun ada, tetapi kondisinya tidak terawat atau sudah disalahgunakan fungsinya oleh pedagang kaki lima. Dan sisanya masih banyak jalur pejalan kaki berupa trotoar yang sudah tidak layak pakai atau rusak, dan otomatis tidak layak untuk digunakan, dan yang masih menunggu untuk mendapatkan pembangunan dari dinas terkait.

Sarana dan prasarana bagi pejalan kaki sangatlah dibutuhkan demi kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan segala aktifitasnya sehari-hari yang tidak jarang digunakan sebagai tempat alternatif menuju tempat tujuan. Kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki sehausnya ditunjang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan sarana dan prasarana yang layak. Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dengan jelas menjelaskan bahwa pejalan kaki berhak atas fasilitas pendukung berupa trotoar. Syarat adanya trotoar yaitu berada di daerah perkotaan yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi, jalan yang dilewati angkutan umum, daerah yang mempunyai aktivitas tinggi dan daerah yang memiliki fasilitas umum dan sosial, seperti tempat ibadah, sekolah, stasiun, tempat olahraga, dan pusat perbelanjaan.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban. Tujuan tersebut sejalan dengan fungsi utama hukum, yaitu mengatur. Ketertiban merupakan syarat dasar bagi adanya suatu masyarakat. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak hak, sedangkan dipihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.<sup>9</sup>

Dalam islam, pengaturan tentang perilaku pemerintah dan warga negara agar tercipta ketertiban bersama, diatur dalam Fiqh Siyasah. Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*). Sehingga dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-

<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 51

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebenarnya dari Para Ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Sedangkan kata siyasah berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemashlahatan serta mengatur keadaan. Sementara *Louis Ma'luf* memberikan batasan siyasah adalah membuat kemashlahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashlahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>10</sup>

Objek kajian Fiqh Siyasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:

1. Hak-hak individu dalam bernegara;
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;
3. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara;
4. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan;

<sup>10</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Pustaka Adamedia Group, 2014), hlm. 2-4

5. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara;
6. Pelaksanaan demokrasi politik;
7. Pengelolaan negaradan pencapaian tujuan; dan
8. Nilai-nilai kemashlahatan dalam bernegara.<sup>11</sup>

Maka dari itu, pentingnya Fiqh Siyasah di dalam pemerintahan, dimana Fiqh Siyasah adalah lebih mementingkan kemashlahatan untuk rakyat umum, serta menolak segala jenis kerusakan (kemudharatan). Mengenai hak bagi pejalan kaki, seharusnya mendapatkan keadilan demi kemashlahatan. Berlaku adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam berbagai nash Al-Qur'an dan Hadist. Prinsip ini merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan agama dibangun atas dasar keadilan, begitu pula terhadap setiap manusia yang mana diperintahkan untuk selalu berlaku adil. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.

Dalam tinjauan Fiqh Siyasah, permasalahan ini berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah yaitu bagian siyasah yang membahas masalah perundang-undangan. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam

<sup>11</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm 36

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>12</sup> Sebagaimana Al-Ghazali Ibn Taimiya berpendapat bahwa seorang pemimpin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan Hukum Allah SWT dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya.

Setiap manusia dianjurkan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT dan tentunya berlaku adil apalagi mengenai suatu hak warga negara, dan tentunya nikmat tersebut selalu kita jaga dan kita lestarikan, agar terciptanya peraturan yang baik dan dapat dipatuhi oleh setiap umat atau masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.s An-Nisa': 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hlm.177

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Pustaka Al-Kautsar, Q.S An-Nisa': 58

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jadi, masalah jalur pejalan kaki berupa trotoar di Jalan HR. Soebrantas, Kecamatan Binawidya atau Kecamatan Tampan, tidak diperhatikan atau belum terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melihat di lapangan. Dan kawasan yang dilengkapi jalur pejalan kaki berupa trotoar juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga pejalan kaki yang berada di Jalan HR. Soebrantas merasa tidak memiliki jalur pejalan kaki berupa trotoar dari pemerintah. Berlaku adil dalam segi hak berarti bagi masing-masing pemiliknya memiliki hak yang tidak boleh di zalimi sebagaimana telah ditetapkan dalam syariah Islam. Yang mempunyai hak untuk berjalan di trotoar yang seharusnya diperhatikan dan terlebih sudah diatur serta dijelaskan di dalam Peraturan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan paparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru ditinjau dari Fiqh Siyasah ( Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki)”**.

#### B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian ini dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan tidak meluas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah penelitian ini yaitu pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pembangunan Jalur Pejalan Kaki berupa trotoar yang dalam penyediaannya sesuai dengan jenis jalan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dan lokasi penelitian di Jalan HR. Soebrantas yang berada di Kecamatan Binawidya/ Tampan Kota Pekanbaru.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep dan Pelaksanaan Pembangunan Jalur Pejalan Kaki (trotoar) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru?
2. Apa Faktor Penghambat yang dihadapi dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap Pembangunan Jalur Pejalan kaki (trotoar) di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam Pembangunan Jalur Pejalan Kaki (trotoar) di Kota Pekanbaru?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana Konsep dan Pelaksanaan Pembangunan Jalur Pejalan Kaki (trotoar) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pembangunan Jalur Pejalan Kaki (trotoar) di Kota Pekanbaru.
  - c. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pembangunan Jalur Pejalan Kaki (trotoar) di Kota Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Dapat memberikan wawasan mengenai Konsep dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pembangunan Jalur Pejalan Kaki (trotoar) di Kota Pekanbaru.
  - b. Mengharapkan dapat mengembangkan konsep pemikiran secara logis, sistematis terkait faktor penghambat di dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pembangunan Jalur Pejalan Kaki (trotoar) di Kota Pekanbaru.
  - c. Untuk menambah pengetahuan dalam tinjauan fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pembangunan Jalur Pejalan Kaki (trotoar) di Kota Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Manfaat bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
- e. Manfaat bagi pembaca, agar sebagai bahan rujukan dan penambah wawasan terhadap pembaca tentang hak pejalan kaki

### E. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya<sup>14</sup>. Penelitian lapangan dilakukan untuk kaneh kehidupan yang sebenarnya. Dalam hal ini penulis akan terjun atau survey ke lapangan.

#### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data, baik dari sampel, informant, ataupun objek penelitian yang diteliti.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan HR. Soebrantas Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih tempat tersebut, karena lokasi memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian, dan selain itu penulis menemukan kesenjangan antara Peraturan Perundang-

<sup>14</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, Cet.1, 2011), hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undangan, peraturan pelaksana dengan pelaksanaannya di lapangan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin di peroleh keterangan. Yang menjadi Subjek Penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Provinsi Riau, dan pejalan kaki.<sup>15</sup>

Sedangkan objek penelitian adalah suatu benda yang dilibatkan dalam suatu aktivitas. Yang menjadi Obyek Penelitian ini adalah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 45 terhadap pembangunan jalur pejalan kaki (trotoar) di Jalan HR. Soebrantas Kecamatan Binawidya/ Tampan Kota Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Menurut Ismiyanto, populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa; orang, benda, suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat diberikan informasi (data) penelitian<sup>16</sup>. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau 1 (satu) orang, staff Bidang Bina Marga Dinas

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>16</sup> Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet.1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 63



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekerjaan Umum Provinsi Riau yang jumlahnya 11 (sebelas) orang dan penduduk Kecamatan Tampan/ Binawidya yang berjumlah 181,910 ribu orang yang tidak menutup kemungkinan untuk berjalan kaki di jalan HR. Soebrantas.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya<sup>17</sup>. Menurut Sax (1979:181), sampel adalah suatu jumlah yang terbatas dari unsur yang dipilih dari suatu populasi<sup>18</sup>. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Accidental Sampling*, yaitu pada teknik sampling ini jumlah sampel tidak ditetapkan terlebih dahulu. Untuk menarik sampel, peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang kebetulan ditemui. Teknik ini didasarkan pada kemudahan (*convenience*). Sampel dapat terpilih karena berada pada waktu, situasi dan tempat yang tepat<sup>19</sup>. Sampel yang penulis ambil yaitu sebanyak 1 (satu) Kepala Bidang Bina Marga, 1 (satu) orang Staff Bidang Bina Marga, dan 10 (sepuluh) pejalan kaki.

### 5. Sumber dan Jenis Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 64

<sup>18</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet. 4, (Jakarta: KENCANA, 2018), hlm. 150

<sup>19</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 127

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.<sup>20</sup>

#### b. Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Menurut Amirin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian. Sumber yang bukan asli yang dimaksud Amirin di sini sebenarnya adalah sumber kedua sebagaimana yang disebut bungin. Minsalnya dokumen struktur organisasi data kearsipan, laporan-laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>21</sup>

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode yang digunakan adalah:

##### a. Metode Observasi

Observasi merupakan kegiatan langsung yang dilakukan dengan melihat dan meneliti kasus yang terjadi. Observasi juga merupakan metode pada saat pengumpulan data dengan cara

<sup>20</sup> Sandu Siyoto, dkk, *Op.Cit*, hlm. 68

<sup>21</sup> Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 71

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pencatatan secara cermat dan juga sistematis<sup>22</sup>. Data yang diobservasi berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti mengamati langsung di lapangan dan mencocokkan data yang di dapat dari hasil wawancara dengan data yang di amati sendiri di lapangan.

#### b. Metode Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah suatu kejadian suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>23</sup>

#### c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak

<sup>22</sup> Soerjono Soeknato, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 13

<sup>23</sup> Muri Yusuf, *Op.Cit*, hlm. 372



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.<sup>24</sup>

## 7. Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data<sup>25</sup>. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang berusaha memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu yang dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>26</sup>

## 8. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

<sup>24</sup> Sandu Siyoto, dkk, *Op.Cit*, hlm. 77

<sup>25</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 9

<sup>26</sup> Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 13-14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu sejarah singkat Kota Pekanbaru, kondisi geografis dan demografis Kota Pekanbaru, visi dan misi Kota Pekanbaru, sejarah umum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, visi dan misi, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS UU NO. 22 TAHUN 2009 DAN FIQH SIYASAH**

Dalam bab ini membahas tinjauan teori yang melandasi penelitian ini yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Fiqh Siyasah.

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian tentang konsep dan pelaksanaan pembangunan jalur pejalan kaki (trotoar) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota pekanbaru, faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota pekanbaru terkait pembangunan jalur pejalan kaki (trotoar), dan tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkait pembangunan jalur pejalan kaki (trotoar)

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kota Pekanbaru

##### 1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pada mulanya, Pekanbaru dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Asal nama Senapelan berasal dari nama pohon Sena. Yang daerahnya meliputi daerah Pekanbaru saat ini sampai ke Kuala Tapung (Bench Kelubi). Daerah yang pada awalnya menjadi pemukiman penduduk sebagai cikal bakal kota adalah ditepi sungai Siak, antara Sungai Sago dan Sungai Senapelan.<sup>27</sup> Setelah itu, perkampungan senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang ramai, yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara Sungai Siak. Tetapi. Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya, melainkan Senapelan.

Perkembangan Senapelan memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit, yang terletak di sekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Kemudian beliau berinisiatif untuk membuat pekan atau pasar di Senapelan, tetapi tidak berkembang. Kemudian, usaha yang telah dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali

<sup>27</sup> Hendri Silva, *Identifikasi Arsitektur Melayu di Kota Pekanbaru*, Jurnal Arsitektur, No. 1, Vol. 2, Januari 2015, hlm. 3-4



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah di tempat yang baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Yang kemudian pekan atau pasar tersebut berkembang menjadi bandar yang sangat ramai.

Selanjutnya, pada hari Selasa tepatnya tanggal 21 Rajab tahun 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk-datuk empat suku yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya, Negeri Senapelan diganti nama menjadi “Pekanbaru”, kemudian diperingati sebagai hari lahir dari Kota Pekanbaru. Mulai Saat itu sebutan Senapelan sudah tidak populer lagi, melainkan dengan sebutan “Pekanbaru” yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.<sup>28</sup>

Adanya perhubungan di antara Pekanbaru dan Taratak Buluh, menyebabkan kota berkembang kearah darat. Kedatangan Jepang di Pekanbaru membuat Pekanbaru berkembang ke arah timur pada bagian selatan sungai Siak. Saat itu dibangunlah jalan Asia yang kemudian menjadi Jalan Sudirman. Tahun 1959, Pekanbaru dikukuhkan sebagai ibukota Provinsi Riau.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Nur Mawan Dalimunthe, *Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Menangani Anak Jalanan*, Skripsi Administrasi Negara, 2019, hlm. 35

<sup>29</sup> Hendri Silva, *Loc.Cit*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Pekanbaru

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis, yang berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, dan terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang, dan Jambi. Secara Geografis Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ}14'$  -  $101^{\circ}34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}25'$  -  $0^{\circ}45'$  Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan dengan luas  $632,26 \text{ km}^2$  dan secara administrasi berbatasan langsung dengan dengan daerah Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar<sup>30</sup>

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Kota Pekanbaru terletak diantara Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, yang memiliki anak sungai yaitu Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Kelulut, Sungai Pengambang, Sungai Ukui, Sungai Sago, Sungai Senapelan,

<sup>30</sup> Peraturan Walikota Pekanbaru No. 56 Tahun 2019 tentang Masterplan Pekanbaru *Smart*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungai Limau, Sungai Tampan, dan Sungai Sail. Sungai Siak ini juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Sedangkan, mengenai Jalan HR. Soebrantas, berawal dari Tabek Gadang, yang merupakan nama yang tidak asing bagi warga Kota Pekanbaru, yang memiliki sejarah yang panjang tidak lain berhubungan dengan pembangunan jalan yang menghubungkan Pekanbaru-Bangkinang, namun sekarang sudah berganti nama dengan Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru.

Jalan HR. Soebrantas yang terletak di wilayah Kecamatan Binawidya yang sebelumnya bernama Kecamatan Tampan atau juga sering disebut Jalan Raya Pekanbaru memiliki status jalan sebagai Jalan Provinsi. Yang merupakan jalan yang sangat strategis karena menjadi jalan penghubung atau jalan utama untuk daerah-daerah lain di Provinsi Riau ataupun luar Provinsi Riau, seperti, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan lainnya. Jalan HR. Soebrantas memiliki panjang jalan 5,6 KM dengan batas wilayahnya dari simpang pasar pagi Arengka-Simpang Panam. Sedangkan dari Simpang Panam-Bangkinang, sudah berganti ke status Jalan Nasional sehingga tidak termasuk jalan provinsi lagi, dengan nama ruas jalannya Jalan Soebrantas-Batas Kabupaten Kampar.<sup>31</sup>

<sup>31</sup>Teza Darsa, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, wawancara, pada 11 Maret 2021



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar II. 1:**  
**Jalan HR. Soebrantas**



Sumber: *Google*, 2021

Penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus meningkat. Ini menandakan Kota Pekanbaru tentu berkembang dan maju sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain bermigrasi ke Kota Pekanbaru. Pada awal 2017, jumlah penduduk Kota Pekanbaru 1.064.566 jiwa dengan penduduk laki-laki 546.400 jiwa dan penduduk perempuan 518.166 jiwa (Pekanbaru dalam angka 2017).<sup>32</sup>

Pada tahun 2014, Kota Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa, yaitu minangkabau, jawa, melayu, batak, tionghoa, bugis, dan lain-lain. Etnis minangkabau merupakan masyarakat terbesar

<sup>32</sup> Peraturan Walikota Pekanbaru No. 56 Tahun 2019 tentang Masterplan Pekanbaru *Smart*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan jumlah sekitar 40,96% dari total penduduk kota. Etnis ini pada umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Akibat dari populasi yang cukup besar, Bahasa Minang telah menjadi bahasa pergaulan yang umum digunakan oleh penduduk Kota Pekanbaru, selain dari Bahasa Indonesia.

Kemudian, etnis yang memiliki proporsi yang cukup besar adalah Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Batak. Hal ini dikarenakan perpindahan ibu kota Provinsi Riau dan Tanjung Pinang ke Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar sehingga menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun, semenjak dari tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.<sup>33</sup>

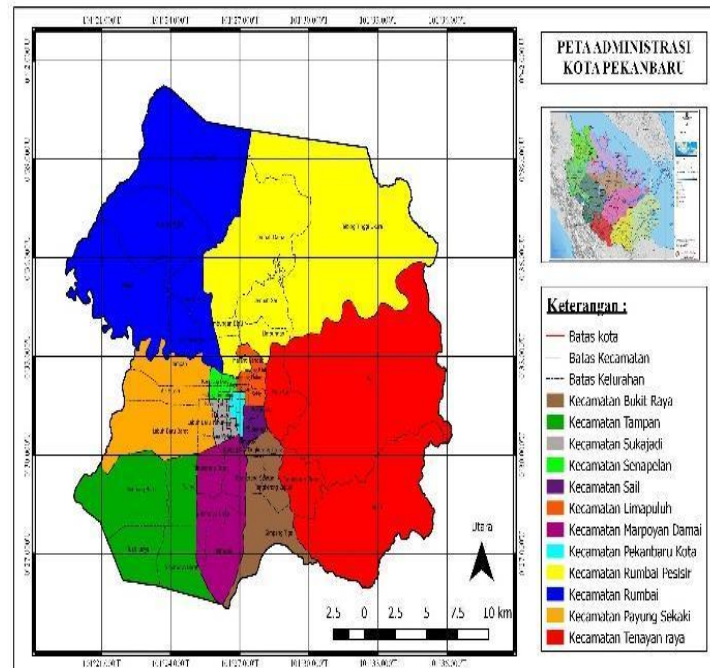
Selain dari etnis, di Kota Pekanbaru juga terdapat berbagai macam agama diantaranya yaitu agama islam, kristen, protestan, katolik, buddha, hindu, konghucu. Agama islam merupakan salah satu agama yang mayoritas penduduknya menganut agama tersebut. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994, ditetapkan pertama kali sebagai penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-1.

<sup>33</sup>Badan Pusat Statistik, Kota Pekanbaru Dalam Angka 2019, dari <http://pekanbarukota.bps.go.id> diakses, pada tanggal 14 April 2021, pukul 15:24 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar II. 2:**  
**Peta Wilayah Kota Pekanbaru**



Sumber: Google, 2021

### 3. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Oleh karena mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru 2017-2022 sesuai dengan Visi dan Misi Walikota atau Wakil Walikota terpilih sebagai berikut:

#### a. Visi Kota Pekanbaru

*“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”*

#### b. Misi Kota Pekanbaru

Untuk rangka pencapaian Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan jangka menengah Kota Pekanbaru 2017-2022.

Adapun misi-misi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi.
- 2) Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu.
- 3) Mewujudkan tata telola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik.
- 4) Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan, dan Industri (olahan dan *MICE*).
- 5) Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (*Liveable City* dan Ramah Lingkungan (*Green City*)).<sup>34</sup>

#### B. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau

##### 1. Sejarah Umum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau<sup>35</sup>

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau yang di singkat dengan Dinas PUPRKPP adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRKPP)

<sup>34</sup> Peraturan Walikota Pekanbaru No. 56 Tahun 2019 tentang Masterplan Pekanbaru Smart

<sup>35</sup> Dokumentasi Hasil Penelitian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya bernama Dinas Pekerjaan Umum (2004-2019), yang merupakan kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum. Kemudian, pada tahun 2020 dilakukan pergantian nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRKPP) dikarenakan adanya penggabungan antara dinas pekerjaan dengan UPT.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRKPP) terbentuk setelah ditetapkan undang-undang darurat No. 19/1957 kemudian diundangkan dengan Undang-Undang No. 61 Tahun 1958. Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksanaan dan penunjang di bidang pekerjaan umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pemerintah dan pembangunan di bidang pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah diserahkan (desentralisasi) dan dilimpahkan (dekonsentralisasi), kepada Daerah Provinsi Riau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Visi dan Misi

Visi dan Misi merupakan bagian penting pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRKPP) dan yang merupakan tujuan dari berdirinya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRKPP) Provinsi Riau itu sendiri. Adapun visi dan misi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRKPP) Provinsi Riau adalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai berikut:<sup>36</sup>

a. Visi

*“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur.”*

b. Misi

- 1) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.
- 2) Meningkatkan Pelayanan Pendidikan.
- 3) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan.
- 4) Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik.
- 5) Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa.
- 6) Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan, Memberikan Reward dan Punishment sebagai wujud semangat kompetitif.
- 7) Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata.
- 8) Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.

### **3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRKPP) Provinsi Riau**

---

<sup>36</sup> Dokumentasi Hasil Penelitian



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- b. Sekretariat terdiri atas:
  - 1) Subbagian Perencanaan Program;
  - 2) Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
  - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Sumber Daya Air terdiri atas:
  - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
  - 2) Seksi Sungai, Danau dan Pantai; dan
  - 3) Seksi Irigasi, dan Rawa.
- d. Bidang Bina Marga terdiri atas:
  - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan;
  - 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
  - 3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
  - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya;
  - 2) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan

<sup>37</sup> Dokumentasi Hasil Penelitian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
  - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - 2) Seksi Perumahan; dan
  - 3) Seksi Kawasan Permukiman.
- g. Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, terdiri atas:
  - 1) Seksi Perencanaan Pertanahan dan Penataan Ruang;
  - 2) Seksi Pertanahan; dan
  - 3) Seksi Penataan Ruang.
- h. Bidang Bina Jasa Kontruksi, terdiri atas:
  - 1) Seksi Pengaturan Jasa Kontruksi;
  - 2) Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Kontruksi; dan
  - 3) Seksi Pendataan dan Sertifikasi Jasa Kontruksi.
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- j. Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas

Sebagaimana terdapat di BAB III, Bagian Kesatu Pasal 6, yang menjelaskan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pada bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

b. Sekretaris

Berdasarkan Pergub Nomor 61 tahun 2019, Bagian Kedua, Pasal 7 menyatakan bahwa Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Subbagian Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Sedangkan untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 2) Menyusun program kerja dan rencana operasional pada sekretariat;
- 3) Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat;
- 4) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan; dan
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas:

- (1) Subbagian Perencanaan Program;
  - (2) Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
  - (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Bina Marga
- Berdasarkan Pergub Nomor 61 Tahun 2019, Bagian Keempat, Pasal 15, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Perencanaan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengendalian Jalan dan Jembatan, Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun program kerja dan rencana operasional pada Bidang Bina Marga;
  - 2) Menyusun perencanaan, pemograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan;
  - 3) Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Bina Marga;
  - 4) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas Bidang Bina Marga; dan
  - 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan Pasal 16 mempunyai tugas yaitu:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- 2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- 3) Melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program dan perencanaan teknik pembangunan dan teknik preservasi jalan dan jembatan;
- 4) Melaksanakan evaluasi, audit dan penetapan leger jalan serta keselamatan jalan dan jembatan;
- 5) Melaksanakan dan pengendalian kontruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan, preservasi jalan dan jembatan;
- 6) Melakukan penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
- 7) Melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan kontruksi jalan;
- 8) Melakukan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan;
- 9) Melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan;
- 10) Melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang kebinamargaan;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11) Melaksanakan pengujian mutu konstruksi dan evaluasi terhadap hasil pengujian mutu konstruksi;
  - 12) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan jalan dan Jembatan; dan
  - 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Pasal 17 mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - 2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - 3) Mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
  - 4) Melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan kapasitas jalan dan jembatan;
  - 5) Melakukan penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
  - 6) Melakukan penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria jalan dan jembatan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
  - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- c) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
- Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Pasal 18 mempunyai tugas:
- 1) Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
  - 2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Saksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
  - 3) Melaksanakan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
  - 4) Melaksanakan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan;
  - 5) Melaksanakan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
  - 6) Melakukan penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
  - 7) Menyusun norma, standar, pedoman, kriteria jalan dan jembatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

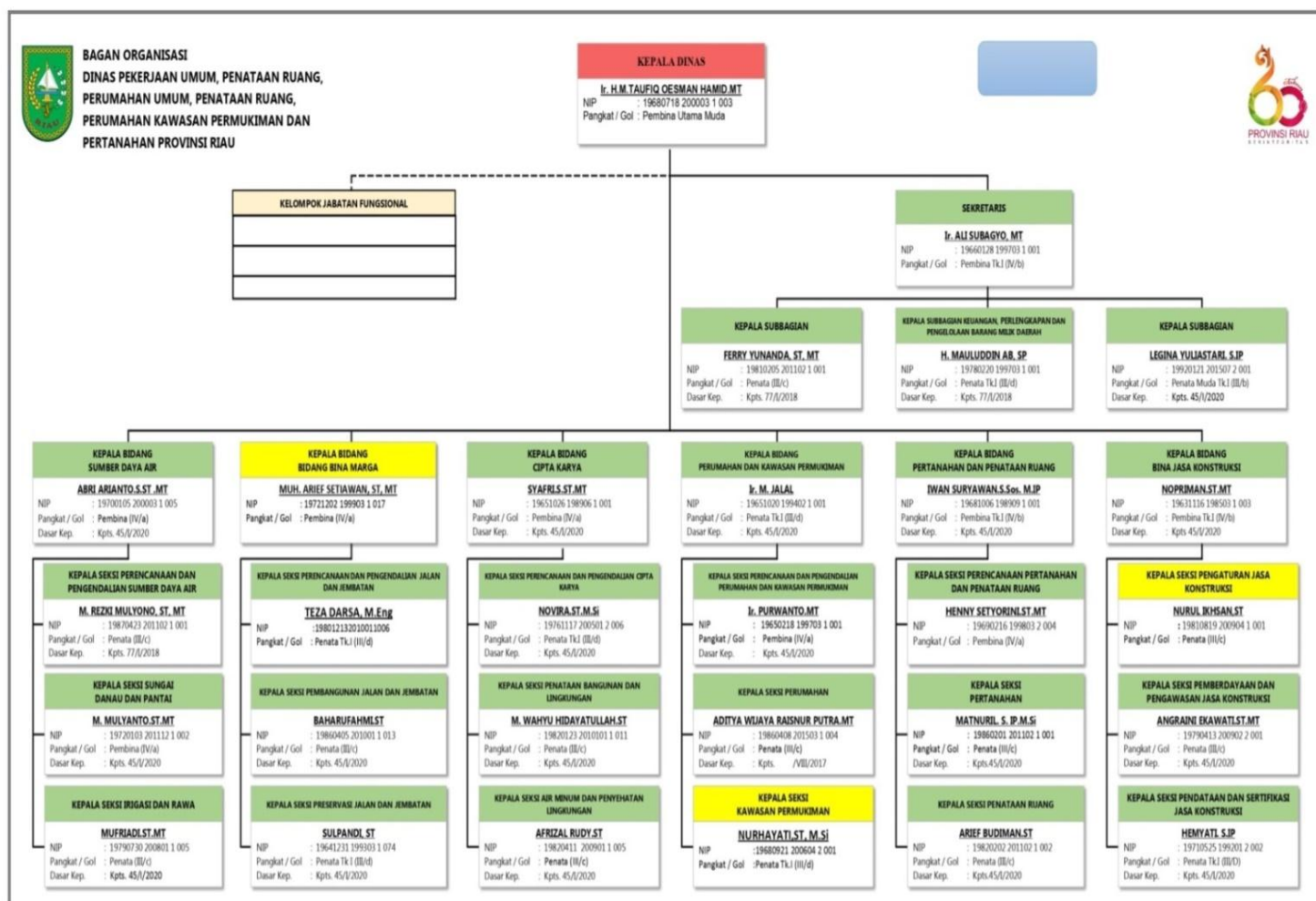
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan pidato, dan sebagainya.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di luar izin yang ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan.

- 8) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**4. Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPRKPP)**

Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRKPP) adalah sebagai berikut:

**Gambar II. 3:**  
**Bagan Organisasi PUPRKPP**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN FIQH SIYASAH

### Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### 1. Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sejarah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada era reformasi pada saat ini. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah melewati berbagai kondisi zaman dengan berbagai kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam *Werverkeersordonnantie*” (*Staatsblad* 1933 Nomor 86). Setelah perkembangan selanjutnya *Werverkeersordonnantie* tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan dirubah lagi dalam *Staatsblad* 1940 No. 72. Kemudian, *Weverordinantei* dirubah lagi setelah Indonesia tepatnya pada tahun 1951 dengan UU No. 3 tahun 1951 Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (*Wegverkeersordonnantie*, *Staatsblad* 1933 No. 86). Kemudian setelah 15 tahun kemudian dari berlakunya UU No. 15 tahun 1951 Pemerintah Indonesia mengatur lagi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kedalam Undang-Undang yang baru serta mencabut peraturan sebelumnya tentang Lalu Lintas dan Angkutan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jalan. Maka lahirnya UU No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada waktu itu atas persetujuan bersama antara Presiden Soekarno dengan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Undang-Undang No. 3 Tahun 1965 ini adalah Undang-Undang pertama yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia setelah Indonesia merdeka.<sup>38</sup>

Seiring perkembangan zaman, selanjutnya lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia diatur kembali perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1965 dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal tersebut harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Setelah berapa lama, setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tersebut ditangguhkan selama setahun melalui PERPU No. 1 Tahun 1992 dengan berbagai pertimbangan pemerintah. Kemudian, Undang-Undang mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terakhir kali diatur di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

<sup>38</sup> Dikutip dari <http://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-danangkutan-jalan-di-indonesia/> di akses pada tanggal 5 februari 2021

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lintas dan Angkutan Jalan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan berlandaskan semangat reformasi dan semangat perubahan. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.<sup>39</sup>

Dengan memiliki tujuan yang hendak dicapai yang terdapat di dalam batang tubuh undang-undang ini yaitu :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>40</sup>

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>39</sup> Dikutip dari <http://www.bantuanhukum.or.id/web/blog/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/> diakses pada tanggal 5 februari 2021

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.<sup>41</sup>

Dalam undang-undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

- 1) Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- 2) Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- 4) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- 5) Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan

<sup>41</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Paragraf ke-2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>42</sup>

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-undang ini memiliki asas dan tujuan yaitu untuk menciptakan, membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain, melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang di jalan, kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan, dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Dan mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, peraturan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.<sup>43</sup>

Dalam undang-undang ini juga disempurnakan terminologi mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas,

<sup>42</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Paragraf ke-3

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.<sup>44</sup>

Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan industri di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan cara memberikan fasilitas, insentif, dan menerapkan standar produk peralatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pengembangan industri mencakup pengembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta perbaikan.

Salah satunya pemberian Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum yaitu diantaranya memberikan perlengkapan jalan berupa fasilitas pendukung bagi pejalan kaki berupa trotoar. Sebelumnya penulis akan menjelaskan pengertian yang berhubungan dengan Pejalan Kaki dan Trotoar.

Berjalan kaki adalah salah satu bentuk pergerakan dari tempat asal (*origin*) ke tempat tujuan (*destination*). Berjalan kaki merupakan sarana (*moda*) transportasi yang paling sederhana. Oleh kesederhanaan ini, sehingga orang yang berjalan kaki berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan pemakai jalan lainnya, dan tidak lain rentan

<sup>44</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Paragraf ke-7



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap konflik atau kecelakaan di saat bercampur dengan moda transportasi yang lain.<sup>45</sup>

Istilah pejalan kaki (*pedestarian*) berasal dari Bahasa Latin “*pedester / pedesters*”, yang berarti orang yang berjalan kaki. Menurut Dirjen Perhubungan Darat, menyatakan bahwa seseorang yang melakukan aktivitas berjalan kaki disebut pejalan kaki. Dan dalam konteks jalan raya, pejalan kaki merupakan salah satu unsur pemakai jalan, di samping pengemudi kendaraan. Menurut Undang-Undang No 22 tahun 2009 pasal 1 ayat (26) tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>46</sup>

Sedangkan jalur pejalan kaki merupakan Menurut Departemen Pekerjaan Umum, Jalur Pejalan Kaki adalah ruang yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas secara mandiri dan dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan. Jalur Pejalan kaki (*pedestrian line*) adalah termasuk fasilitas pendukung yaitu fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan baik yang berada di badan jalan maupun yang berada di luar badan jalan, dalam rangka keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu

<sup>45</sup> Lasmini Ambarwati, dkk, *Pejalan Kaki Riwayatmu Dulu dan Kini*, Cet.1, ( Gedung INPIS: 2018), hlm. 1

<sup>46</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lintas serta memberikan kemudahan bagi pemakai jalan.<sup>47</sup>

*Pedestrian* atau jalur pejalan kaki pada umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan jalan, guna untuk menjamin keselamatan pejalan kaki. Jalur pejalan kaki yang baik akan mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor, meningkatkan atau mempromosikan sistem skala manusia, menciptakan kegiatan usaha yang lebih banyak, dan juga membantu meningkatkan kualitas udara.

Adapun aturan yang mengatur tentang jalur pejalan kaki berupa trotoar di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

Pasal 25 ayat 1

(1) “Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Alat penerangan Jalan;
- e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki dan penyandang cacat; dan
- h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan;<sup>48</sup>

Dalam memberikan alat kelengkapan jalan, memiliki kegunaan untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan.

<sup>47</sup> Baju Arie Wibawa, dkk, *Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula (Evaluasi Jalur Pejalan Kaki DI Kota Semarang Menurut Permen PU 03/PRT/M/2014*, Skripsi Teknik Arsitektur, hlm. 3

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 28 ayat 1

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.”<sup>49</sup>

Pasal 45 ayat 1 dan 2

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
  - a. Trotoar;
  - b. Lajur sepeda;
  - c. Tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
  - d. Halte; dan/ atau
  - e. Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia.<sup>50</sup>
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah untuk jalan nasional;
  - b. Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
  - c. Pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa;
  - d. Pemerintah kota untuk jalan kota; dan
  - e. Badan usaha jalan tol untuk jalan tol.<sup>51</sup>

Pasal 93 ayat 1 dan 2

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan b. Pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki; c. Pemberian kemudahan bagi penyandang cacat; e. Pemaduan berbagai moda angkutan;<sup>52</sup>

Pasal 131 tentang Hak Pejalan Kaki

- (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.<sup>53</sup>

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

- a. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- b. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- c. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- d. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.<sup>54</sup>

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.

- a. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk (a dan b), yang menghubungkan kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- d. Jalan kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
- e. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar-permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.<sup>55</sup>

Adapun Macam-Macam Jalur Pejalan Kaki berdasarkan pedoman teknik perencanaan jalur pejalan kaki pada jalan umum, yaitu sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Trotoar, merupakan bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

<sup>56</sup> Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki pada Jalan Umum No.032/T/BM/1999

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberi lapisan permukaan dengan elevansi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.

- 1) Geometrik trotoar harus mengikuti pedoman teknik tentang spesifikasi trotoar.
  - 2) Tinggi ruang bebas tidak kurang dari 2,2 meter dan kedalaman bebas tidak kurang dari 1 meter yang diukur dari permukaan trotoar, kebebasan samping tidak kurang dari 0,3 meter.
  - 3) Pemasangan utilitas harus memperhatikan ruang bebas trotoar.
- b. Fasilitas Penyeberangan

- 1) Penyeberangan Sebidang (At-Grade)

Penyeberangan sebidang terdiri atas 2 macam yaitu:

1. Zebra Cross (Penyeberangan Zebra) adalah fasilitas penyeberangan yang ditandai dengan garis-garis berwarna putih searah arus kendaraan dan dibatasi garis melintang lebar jalan. Zebra Cross ditempatkan di jalan dengan jumlah aliran penyeberang jalan atau arus yang relatif rendah sehingga penyeberang masih mudah memperoleh kesempatan yang aman untuk menyeberang. Persyaratan penggunaan Zebra Cross antara lain:
  - a) Dipasang di kaki persimpangan tanpa alat pemberi isyarat lalu lintas atau di ruas jalan,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Apabila persimpangan diatur dengan lampu pengatur lalu lintas, pemberian waktu penyeberangan bagi pejalan kaki menjadi satu kesatuan dengan lampu pengatur lalu lintas persimpangan,

c) Apabila persimpangan tidak diatur dengan lampu pengatur lalu lintas maka kriteria batas kecepatan kendaraan bermotor adalah  $<40$  km/jam

2. Penyeberangan pelican adalah Zebra cross yang dilengkapi dengan lampu pengatur bagi penyeberang jalan dan kendaraan. Bagi penyeberang jalan dihasilkan dengan menekan tombol pengatur dengan lama periode berjalan yang telah ditentukan. Fasilitas ini bermanfaat bila ditempatkan di jalan dengan arus penyeberang jalan yang tinggi. Penggunaan dari pelican dengan syarat:

a) Dipasang pada ruas jalan, minimal 300 meter dari persimpangan, atau

b) Pada jalan dengan kecepatan operasional rata-rata lalu lintas kendaraan  $>40$  km/jam

2) Penyeberangan Tidak Sebidang (Elevated/ Underground)

Penyeberangan tidak sebidang terdiri atas 2 kategori yaitu:

1. Elevated/ Jembatan adalah jembatan yang dibuat khusus bagi para pejalan kaki. Fasilitas ini bermanfaat jika ditempatkan di jalan dengan arus penyeberang jalan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan yang tinggi, khususnya pada jalan dengan arus kendaraan berkecepatan tinggi. Jembatan akan berfungsi dengan baik apabila bangunannya landai atau tidak terlalu curam. Jembatan penyeberangan ini dapat mengurangi kemacetan arus lalu lintas yang salah satu penyebab adalah banyaknya orang yang menyeberang di jalan. Persyaratan penggunaan jembatan penyeberangan antara lain:

- a) Jenis jalur penyeberangan dengan menggunakan zebra atau pelican sudah mengganggu lalu lintas kendaraan yang ada.
  - b) Pada ruas jalan dengan frekuensi terjadinya kecelakaan pejalan kaki yang cukup tinggi.
  - c) Pada ruas jalan yang mempunyai arus lalu lintas dengan kecepatan tinggi dan arus pejalan kaki yang cukup ramai.
2. Underground/ Terowongan yaitu sama halnya dengan jembatan penyeberangan, namun pembangunannya dilakukan di bawah tanah. Tentu dalam pembuatan terowongan bawah tanah untuk penyeberang membutuhkan perencanaan lebih rumit dan lebih mahal daripada jembatan penyeberangan, namun sistem terowongan ini lebih indah karena bisa dapat menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Underground/ terowongan digunakan apabila:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Jenis jalur penyeberangan dengan menggunakan elevated/ jembatan tidak dimungkinkan untuk diadakan.
- b) Lokasi lahan/ medan memungkinkan untuk dibangun underground/ terowongan.

Selanjutnya, pengertian Trotoar menurut keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No. 76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevansi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.

Dengan kata lain, trotoar merupakan suatu area yang digunakan untuk berbagai aktivitas masyarakat. Menurut Grigg (1988), *“infrastruktur sebuah kota terdiri dari 6 unsur yaitu: Roads grup, Transportation servicegroup, Water group, Waste Management group, Building and outdoor sports group, energy production an distribution.* Trotoar sebagai salah satu pelengkap dari 6 unsur transportasi (halte, parkir), saluran air (terbuka atau tertutup), tempat sampah, jaringan telpon / listrik yang penempatannya diatas atau dibawah trotoar. Menurut Danisworo (1991), trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang dibuat terpisah dari jalur kendaraan umum, biasanya terletak bersebelahan atau berdekatan. Shirvani (1985) menyatakan trotoar merupakan elemen



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perancangan kota yang penting, yaitu membentuk hubungan antar aktivitas pada suatu lokasi. Trotoar merupakan subsistem linkage dari jalur jalan suatu kota. Trotoar akan semakin penting bila pejalan kaki adalah sebagai pengguna utama jalur tersebut bukan kendaraan bermotor atau yang lainnya. Fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki tersebut.<sup>57</sup>

Dalam membangun trotoar, dapat juga direncanakan pada ruas jalan yang terdapat volume pejalan kaki lebih dari 300 orang per 12 jam dan volume lalu lintas lebih dari 1000 kendaraan per 12 jam maka perlu disediakan trotoar. Dan untuk tercapainya sarana berjalan kaki yang nyaman, dibutuhkan beberapa kriteria atau aturan dalam penempatan trotoar dan fasilitas penunjang lainnya yaitu sebagai berikut :

- 1) Suatu ruas jalan dianggap perlu dilengkapi dengan trotoar apabila disepanjang jalan tersebut terdapat penggunaan lahan yang mempunyai potensi menimbulkan pejalan kaki. Penggunaan lahan tersebut antara lain perumahan, sekolah, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, pusat perkantoran, pusat hiburan, pusat kegiatan social, daerah industry, terminal bus dan lain-lain.
- 2) Secara umum trotoar dapat direncanakan pada ruas jalan yang terdapat volume pejalan kaki lebih besar dari 300 orang per 12 jam

<sup>57</sup> Moch Fathoni Setiawan, *Studi Perilaku Pejalan Kaki Pada Trotoar (Pedestrian Ways) Di Jakarta Ditinjau Dari Kenyamanan Iklim*, Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan, No. 2 Vol. 13 Juli 2011, hlm. 185

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(06.00-18.00).

- 3) Penempatan trotoar telah ditentukan seperti ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar dari jalur lalu lintas (bila tersedia jalur parkir). Namun, bila jalur tanaman tersedia dan terletak di sebelah bahu kiri jalan atau parkir, trotoar harus dibuat bersebelahan dengan jalur tersebut.
- 4) Trotoar sedapat mungkin ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau diatas saluran drainase yang telah ditutup dengan plat beton yang memenuhi syarat.
- 5) Trotoar pada pemberhentian bus harus ditempatkan berdampingan/sejajar dengan jalur bus. Trotoar dapat ditempatkan di depan atau di belakang halte.<sup>58</sup>
- 6) Penempatan perlengkapan jalan pada prinsipnya harus diletakkan pada sisi dalam sisi kiri dari trotoar.
- 7) Bila trotoar bersebelahan langsung dengan tanah milik perorangan, maka sarana penghijauan kota (pohon, pot) haruslah ditanam di sisi dalam dari trotoar, namun bila terdapat ruang cukup antara trotoar dengan tanah milik perorangan tersebut maka sarana penghijauan kota dapat ditanam di sisi luar trotoar.
- 8) Trotoar sebaiknya memiliki elevansi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk arus lalu lintas.

<sup>58</sup> Petunjuk Perencanaan Trotoar, Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembinaan Jalan Kota NO. 007/T/BNKT/1990, hlm. 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Trotoar seharusnya diletakkan di areal yang memungkinkan pejalan kaki terlindungi dari cuaca buruk, atau koridor trotoar ditanami pohon peneduh dan disediakan tempat istirahat/duduk.<sup>59</sup>

#### Dimensi Trotoar

Mengacu pada penyediaan trotoar, pemerintah harus menyediakan fasilitas tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur Departemen Pekerjaan Umum (1999). Trotoar harus memiliki lebar jalur dan ruang bebas yang mencukupi pergerakan berjalan kaki sesuai dengan daerah / tempat fasilitas tersebut disediakan.

##### 1) Ruang Bebas Trotoar

Tinggi bebas trotoar tidak kurang dari 2,5 meter dan kedalaman bebas trotoar tidak kurang dari satu meter dari permukaan trotoar. Kebebasan samping trotoar tidak kurang dari 0,3 meter. Perencanaan pemasangan utilitas selain harus memenuhi ketentuan ruang bebas trotoar, harus juga memenuhi ketentuan-ketentuan dalam buku petunjuk pelaksanaan pemasangan utilitas.

##### 2) Lebar trotoar

Lebar trotoar harus dapat melayani volume pejalan kaki yang ada. Trotoar yang sudah ada perlu ditinjau kapasitas (lebar), keadaan dan penggunaannya apabila terdapat pejalan kaki yang menggunakan jalur lalu lintas kendaraan. Trotoar disarankan untuk direncanakan dengan dengan tingkat pelayanan serendah-

<sup>59</sup> Standard Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Jalan-Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Maret 1992, hlm 18



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendahnya C. Pada ketentuan tertentu yang tidak memungkinkan trotoar dapat direncanakan sampai dengan tingkat pelayanan E.

Tabel III. 1:  
Tingkat Pelayanan Trotoar

Tingkat Pelayanan	Modul (m <sup>2</sup> /orang)	Volume (orang/meter/menit)
A	$\geq 3,25$	$\leq 23$
B	2,30 - 3,25	23 - 33
C	1,40 - 2,30	33 - 50
E	0,90 - 1,40	50 - 66
F	0,45 - 0,90	66 - 82
	$\geq 0,45$	$\geq 82$

Sumber : *Petunjuk Perencanaan Trotoar (1990)*

Lebar trotoar disarankan tidak kurang dari 2 meter. Pada keadaan tertentu lebar trotoar dapat direncanakan sesuai dengan batasan lebar minimum pada tabel berikut.

Tabel III. 2: Lebar minimum trotoar menurut penggunaan lahan

Penggunaan lahan sekitarnya	Lebar minimum (m)
- Perumahan	1,5
- Perkantoran	2,0
- Industri	2,0
- Sekolah	2,0
- Terminal/ Stop Bus	2,0
- Pertokoan/ Perbelanjaan	2,0
- Jembatan/ terowongan	1,0

Sumber : *Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan Direktorat Jenderal Bina Marga-Departemen Pekerjaan Umum (1990)*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut klasifikasi jalan, dalam perencanaan trotoar di Indonesia terdapat beberapa standar perencanaan trotoar yaitu :<sup>60</sup>

Tabel III. 3: Klasifikasi Jalan

Klasifikasi Kelas Jalan		Standar Minimum (M)	Lebar Minimum (Pengecualian)
Tipe II	Kelas I	3,0	1,5
	Kelas II	3,0	1,5
	Kelas III	1,5	1,0

Sumber : *Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan. Direktorat Jenderal Bina Marga- Departemen Pekerjaan Umum (1992)*

Pada umumnya jalan tipe II kelas 1, kelas II dan kelas III dilengkapi dengan trotoar kecuali jalan kelas I seperti misalnya jalan pintas (bypass) di mana memang tidak disediakan akses samping. Sedangkan pada daerah pinggiran kota di mana volume pejalan kaki lebih dari 300 orang per 12 jam dan volume kendaraan melebihi 1000 kendaraan per 12 jam maka perlu disediakan trotoar.

Fungsi trotoar sebagai komponen yang terintegrasi dari sistem jalan yang ramah bagi pejalan kaki dimana mereka mendapatkan keamanan, kenyamanan, *aksesibilitas*, dan pergerakan yang efisien. Trotoar dapat meningkatkan keamanan bagi pejalan kaki dengan memisahkan pergerakan mereka dengan lalu lintas dan kendaraan. Berikut kriteria yang harus dimiliki trotoar :<sup>61</sup>

<sup>60</sup>Standard Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga-Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Maret 1992, hlm. 17

<sup>61</sup>Novalino Pratama, *Studi Perencanaan Trotoar di Dalam Lingkungan Kampus Universitas Sriwijaya Inderalaya*, Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, Vol. 2, No. 2, Juni 2014, hlm. 274

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Aksesibilitas*, trotoar harus dapat diakses dengan mudah oleh semua pengguna, baik yang sehat fisik maupun penyandang cacat.
- 2) *Keamanan*, lingkungan harus memungkinkan pedestrian untuk merasakan keamanan dan terhindar dari hal-hal yang tidak terduga. Pengguna trotoar harus merasa tidak terancam dengan lalu lintas yang bersebelahan dengannya.
- 3) *Lebar yang cukup*, pada beberapa tempat, dua orang yang berjalan berdampingan harus dapat dilalui oleh orang ketiga yang sedang berjalan, dan perbedaan kecepatan berjalan mungkin saja dapat terjadi.
- 4) *Kontinuitas*, kesinambungan jalur pejalan kaki di sepanjang trotoar harus jelas dan tidak membuat mereka terpaksa berjalan keluar jalurnya.
- 5) *Lansekap*, pepohonan dan tanaman di sepanjang trotoar harus dapat menciptakan iklim mikro yang diinginkan dan harus memberikan kontribusi bagi kenyamanan psikologi dan visual pejalan kaki.
- 6) *Ruang sosial*, trotoar harus menyediakan tempat bagi manusia untuk berinteraksi. Harus ada untuk berdiri, melakukan kontak sosial, dan duduk. Trotoar harus mampu mengakomodasi ruang bagi anak-anak untuk dapat melakukan kegiatannya secara aman.
- 7) *Kualitas lingkungan*, harus dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan karakter suatu lingkungan perumahan dan komersial dan memperkuat identitas lingkungan tersebut.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Keindahan, keadaan lingkungan yang memberi rasa kepuasan yang sesuai dengan panca indera disertai dengan fasilitas yang sesuai dengan kegiatan.
- 9) Waktu, menurut Utermann dalam Indraswara dalam Tisnaningtyas (2007), berjalan kaki pada waktu-waktu tertentu akan mempengaruhi jarak berjalan yang mampu ditempuh.
- 10) Ketersediaan transportasi publik, transportasi publik sebagai moda pengantar sebelum dan sesudah berjalan kaki sangat mempengaruhi jarak tempuh berjalan kaki. Ketersediaan transportasi publik yang memadai akan mendorong orang berjalan kaki lebih jauh.

## **2. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Menurut Bagir Manan, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum dan dibuat secara sistematis sesuai dengan jenis dan hierarki yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, proses pembentukan undang-undang yang baik, harus diatur secara komprehensif baik mengenai proses perencanaan, penyiapan, pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangan.

Pada dasarnya undang-undang ini sudah diatur secara komprehensif dan terperinci. Namun untuk melengkapi secara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasional, diatur ketentuan secara teknis ke dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri, dan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peraturan pelaksanaannya.<sup>62</sup>

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan semula.<sup>63</sup>

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan pemerintah tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (5), Pasal 25 ayat (2), Pasal 42, Pasal 43 ayat (4), Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>62</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Paragraf ke-28

<sup>63</sup> Abdullah Syukur. *Kumpulan Makalah, "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Perdekatan Dalam Pembangunan"*, (Persadi: Ujung Padang, 198, hlm 40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk kepentingan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, yang meliputi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Penerangan Jalan, Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, terminal penumpang, terminal barang untuk umum dan terminal barang untuk kepentingan sendiri, fasilitas parkir umum, fasilitas pendukung yang terdiri atas trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, serta fasilitas pendukung bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, dan wanita hamil. Perlengkapan jalan dan prasarana angkutan jalan tersebut merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>64</sup>

Mengenai jalur pejalan kaki yang merupakan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, di Peraturan Pemerintah ini dijelaskan sebagai berikut:

**Pasal 113**

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
  - a. Trotoar;

<sup>64</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Lajur sepeda;
  - c. Tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
  - d. Halte; dan/ atau
  - e. Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.<sup>65</sup>
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh;
  - a. Menteri untuk jalan nasional;
  - b. Gubernur untuk jalan provinsi;
  - c. Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa;
  - d. Walikota untuk jalan kota; dan
  - e. Badan usaha pengelola jalan tol untuk jalan tol.<sup>66</sup>
- (3) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 114

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (1) huruf a disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pesepeda apabila tidak tersedia jalur sepeda.
- (3) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Keamanan;
  - b. Keselamatan;
  - c. Kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
  - d. Kelancaran lalu lintas.<sup>67</sup>

### Pasal 115

Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 harus disediakan pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan.<sup>68</sup>

<sup>65</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>66</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>67</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>68</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bahwa dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, maka perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan.

Di dalam Keputusan Menteri Perhubungan ini, diatur tentang persyaratan teknis mengenai fasilitas pendukung, meliputi:

**Pasal 2**

Fasilitas pendukung meliputi:

- a. Fasilitas pejalan kaki;
- b. Fasilitas parkir pada badan jalan;
- c. Fasilitas halte;
- d. Fasilitas tempat istirahat;
- e. Fasilitas penerangan jalan.<sup>69</sup>

**Pasal 3**

- (1) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:
  - a. Trotoar;
  - b. Tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas;
  - c. Jembatan penyeberangan;
  - d. Terowongan penyeberangan.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
  - a. Lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

<sup>69</sup> Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Memiliki ruang bebas di atasnya sekurang-kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar.<sup>70</sup>

- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan berupa :<sup>71</sup>

- a. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan
- b. Jaringan pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
- c. Prasarana dan sarana jaringan pejalan adalah fasilitas yang disediakan disepanjang jaringan pejalan kaki untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.
- d. Perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki adalah suatu proses untuk menentukan penyediaan dan pemanfaatan

<sup>70</sup> Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>71</sup> PERMEN Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dalam rencana tata ruang.

- e. Penyediaan prasarana sarana pejalan kaki adalah pengadaan dan/atau perwujudan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki yang berguna untuk menyediakan aksesibilitas dan mobilitas pejalan kaki.
- f. Pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki adalah aktivitas penggunaan fasilitas jalur pejalan kaki baik oleh pejalan kaki maupun pengguna lain yang diperbolehkan.
- g. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
- d. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Adapun Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru yang mengatur tentang fasilitas Pejalan Kaki<sup>72</sup> Pasal 130 ayat 2

“Dilarang menggunakan trotoar diluar fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan, dan keselamatan pejalan kaki dan/ atau pemakai jalan lainnya.

Pasal 131 ayat 1

- (1) Fasilitas Pejalan Kaki terdiri dari:
  - a. Trotoar;
  - b. Tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas;
  - c. Jembatan penyeberangan,
  - d. Terowongan penyeberangan.
- e. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017

<sup>72</sup> Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengaturan mengenai sektor perhubungan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah tidak sesuai lagi dan harus dilakukan penyesuaian.<sup>73</sup>

Dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, maka perlu adanya suatu Peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah. Dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kota Pekanbaru serta diperlukannya pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih jelas, tegas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud diubah dan disesuaikan.

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah terciptanya keselamatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi jalan yang terpadu, selamat,

<sup>73</sup> Penjelasan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Paragraf ke-1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertib, lancar, aman, dan nyaman dengan biaya yang terjangkau dengan daya beli masyarakat.

## B. Fiqh Siyasah

### Pengertian Fiqh Siyasah

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia”, atau keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Sedangkan menurut istilah, fiqh adalah :

العلم بأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية

“Ilmu atau pemahaman tentang huku-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).”<sup>74</sup>

Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Ed.1, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2014), hlm 2-3

<sup>75</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Ed. 1, Cet. 5 ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 22



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Imam Hanafi mengartikan fiqh sebagai pengetahuan seseorang mengenai hak dan kewajibannya. Dan dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari Para Ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.<sup>76</sup>

Sedangkan kata *siyasah* atau *siyasiyah*, *sasa* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, ( ساس- يسوس- سيا ) atau *dabbara-yudabbiru-tadbiiran* yang memiliki banyak makna antara lain mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian, mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*), dan memerintah (*sturen*), atau memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan (*politic* dan *policy*), seperti para penguasa yang mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan, dan juga mengatur urusan kehidupan masyarakat.<sup>77</sup>

Menurut Beni Ahmad Saebani dengan mengutip pendapat Quraisy Shihab dan Dedi Supriyadi mengungkapkan bahwa *siyasah* diartikan dengan 'politik' sebagaimana uraian ayat-ayat Al-Qur'an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata hukum yang tetap sejalan dengan pengertian di awal yaitu mengatur, memerintah, memimpin, mengendalikan, mengemudi dan cara pengendalian. Makna ini (*Siyasah*) sejalan dengan posisi manusia sebagai

<sup>76</sup> Ridwan, *FIQH POLITIK: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Cet. 1, (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm. 53

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 61-62

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khalifah di muka bumi yang tugasnya memakmurkan bumi untuk kesejahteraan manusia.<sup>78</sup>

Secara terminologi, menurut Adbul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa *siyasah* sebagai Undang-Undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Menurut Ibnu Qayyim yang dinukil dari Ibnu 'Aqil definisi *siyasah* dalam arti fiqh adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Adapun Ibn manzhur mendefinisikan *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>79</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Fiqh Siyasah* ialah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudharatan dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah *kulliy*,

<sup>78</sup> Randi Muchariman, Helmi Al-Djufri, *Siyasah Kebangsaan: Analisis Siklus Seratus Tahun Bangsa Indonesia (1928-2028) dalam Perspektif Pemikiran Imam Al Ghazali dan Ibnu Khaldun*, Cet. 1, (Jawa Tengah: Penulis Muda, 2016), hlm.6-7

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.<sup>80</sup> Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaan.<sup>81</sup>

#### Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ada beberapa macam fiqh siyasah ini, dan memiliki berbagai pendapat. Lebih lanjut, disebutkan bahwa *fiqh siyasah* dapat dipersempit meliputi empat bidang, yaitu *fiqh siyasah dusturiyah*, mencakup ( *siyasah tasyri'iyah*, *siyasah qadha'iyah*, *siyasah iddariyyah*, *siyasah tanfidziyah*), *fiqh siyasah dauliyah/kharijiyah*, *fiqh siyasah maliyah*, *fiqh siyasah harbiyah*.<sup>82</sup>

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedaan fiqh siyasah. Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:<sup>83</sup>

<sup>80</sup> Agus Ruswandi, *Al-Islam II: Buku Daras Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKK)*, (UNINUS BANDUNG, 2015), hlm. 117

<sup>81</sup> Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hlm. 5

<sup>82</sup> Suyuthi Pulungan, *Op.cit*, hlm. 40

<sup>83</sup> Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hlm. 15



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Siyasah Dusturiyah Syar'iiyyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
2. *Siyasah Tasyri'iiyyah Syar'iiyyah* (Politik Hukum)
3. *Siyasah Qadha'iiyyah Syar'iiyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
4. *Siyasah Malliyah Syar'iiyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iiyyah* (Politik Administrasi Negara)
6. *Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah Syar'iiyyah* (Politik Hubungan Internasional)
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iiyyah* (Politik Penerapan)

Contoh lain dari pembidangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam 4 bidang, yaitu:<sup>84</sup>

1. *Fiqh Dustury*
2. *Fiqh Mally*
3. *Fiqh Dawly*
4. *Fiqh Harbiy*

Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan:

Pertama, *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga

<sup>84</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hlm. 31

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Kedua, *fiqh siyasah maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, pengeluaran uang milik negara. Ketiga, *Fiqh siyasah dawliyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Keempat, *Fiqh siyasah harbiyyah*, yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya tentang arti, tujuan dan macam-macam peperangan dalam islam.<sup>85</sup>

### Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, *siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan menjadi pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi dua yaitu, sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah menjadi tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain sumber AL-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat-istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

---

<sup>85</sup> Ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode kajian fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh pada umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh yang sudah teruji keakuratannya dalam menyelesaikan berbagai masalah. Metode ushul fiqh antara lain adalah *qiyas*, *istihsan*, *'urf*, *'adah*, *mashlahah mursalah*, dan *istishab*. Dengan metode ini, umat islam memberikan kebebasan berpikir bagi penggunanya.<sup>86</sup>

#### Siyasah Dusturiyah

##### a. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari kata Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (*majusi*). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan.<sup>87</sup>

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara, antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), *legislasi* (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan serta membahas konsep negara hukum dalam

<sup>86</sup> Suyuthi Pulungan, *Op.cit*, hlm. 30

<sup>87</sup> Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hlm 177-178



siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>88</sup>

Permasalahan *Fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>89</sup>

*Siyasah dusturiyah* mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. *Siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal di bawah ini:<sup>90</sup>

1. Kajian tentang *konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah*, hak dan kewajibannya
2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya.
3. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman
4. Kajian tentang *waliyul ahdi*
5. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*
6. Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqdi*
7. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidetil dan parlementer, dan
8. Kajian tentang pemilihan umum.

<sup>88</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Loc.cit

<sup>89</sup> H.A. Djazuli, *Op.cit*, hlm. 49

<sup>90</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammad SAW. Hingga Al-khulafaur Ar-Rasyidin*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015), hlm. 40

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kajian siyasah dusturiyah umumnya mengacu pada dalil-dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *maqasid syariah* yang menjadi ide dasar pengetahuan tentang pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Semangat ajaran islam didalam dalil *kully* dijadikan standar utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacu pada lima tujuan syariat islam.<sup>91</sup>

### b. Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah

Sesuai dengan tujuan negara yaitu menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negrara mempunyai tugas-tugas penting dalam merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas yang dimainkan dalam hal ini, yaitu antara lain:

Pertama, *Al-Sulthah al-Tasri'iyyah* (Kekuasaan Legislatif). Tugas *al-sulthah al-tasyri'iyyah* adalah menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran-ajaran islam. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nashsh-nashsh Al-Qur'an dan Hadist. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melalukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nashsh-nya, terhadap masalha yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode

---

<sup>91</sup> Ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*. Kemudian dalam masa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).<sup>92</sup>

Kedua, *Al-Sulthah al-tanfidziyah* (kekuasaan eksekutif), bertugas melaksanakan undang-undang. Di dini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya.<sup>93</sup>

Ketiga, *Al-Sulthah al-qadha'iyah* (kekuasaan yudikatif), bertugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah islam kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan

<sup>92</sup> Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hlm. 157

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 158



dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>94</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>94</sup> *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Berdasarkan analisis di bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru ditinjau dari Fiqh Siyasah yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Karena kenyataan dilapangan, banyaknya ditemukan kawasan jalan yang tidak ada dibangun trotoar, dan yang dibangun pun juga tidak memenuhi standar atau rusak, dan disalahgunakan. Alasannya, setelah jalan HR. Soebrantas berubah status jalan dari jalan nasional ke jalan provinsi pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau belum melakukan pembaharuan terhadap pembangunan trotoar di jalan HR. Soebrantas, menimbang skala prioritas dan skop wilayah yang besar, maka dinas terkait lebih mendahulukan untuk memperbaiki jalan yang rusak. Jadi dalam konsepnya, baru tentang pembangunan jalan. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut hanyalah untuk memenuhi hak dan melindungi keselamatan, serta memberikan rasa nyaman dan aman terhadap pejalan kaki di saat berada di jalan lalu lintas umum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru terdapat beberapa faktor penghambat, yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut yaitu sebagai berikut:
  - a. Perencanaan yang tidak menyeluruh terhadap pembangunan trotoar di jalan HR. Soebrantas, karena kalau tidak adanya perencanaan, maka sulit dalam penganggaran dan sebuah perencanaan merupakan pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
  - b. Kurangnya ketersediaan anggaran dalam pembangunan, karena dengan adanya dana yang cukup, pelaksanaan pembangunan jalur pejalan kaki berupa trotoar di Jalan Hr. Soebrantas dapat terlaksana dan berjalan lancar.
3. Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru terhadap Pembangunan Jalur Pejalan Kaki (trotoar), seorang pemimpin memiliki tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang sudah diembannya yang sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat. Sebagaimana terdapat di dalam QS. An-Nisa' ayat 58 yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya, maka janganlah untuk melalaikan amanat-amanat itu. Dan Dia memerintahkan kalian untuk





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutuskan perkara diantara manusia dengan dasar keadilan dan obyektif, bila kalian memutuskan permasalahan diantara mereka. Maka dari itu, sesuatu yang sudah dipercayakan kepada seseorang, harus dilaksanakan sebaik-baiknya demi tercapainya hak seseorang dalam bernegara dan demi kemaslahatan bersama, dan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran seorang pemimpin dalam konsep *Al-Ukhuwwah* yang menjadi salah satu nilai dasar *Syari'ah*.

### B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada beberapa saran yang dapat penulis berikan dari proses dan hasil yang diperoleh dalam penelitian. Yaitu penulis memberikan saran kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau terkhusus Bidang Bina Marga, yang selaku dinas yang memiliki salah satu tanggung jawab dalam pembangunan jalur pejalan kaki (trotoar) di Jalan Provinsi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk lebih memperhatikan hak pejalan kaki dan melakukan pembaharuan dibidang pembangunan yang berhubungan dengan pejalan kaki misalnya tentang pembangunan trotoar disuatu kawasan jalan yang memenuhi syarat, misalnya di Jalan HR. Soebrantas yang tidak memiliki jalur khusus untuk pejalan kaki. Karena pembangunan trotoar disuatu kawasan jalan yang memenuhi syarat dapat memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Selain itu dapat menjadikan suatu daerah tersebut menjadi pusat perhatian dari pendatang dari luar daerah, kemudian dengan adanya jalur khusus untuk pejalan kaki tersebut, dapat memicu masyarakat untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih berjalan kaki, sehingga dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dan penulis menyarankan, untuk melakukan perencanaan pembangunan trotoar, dan perawatan terhadap trotoar yang sudah ada. Menimbang saat ini di jalan HR. Soebrantas memiliki tingkat kesibukkan yang tinggi.

Meskipun jumlah pejalan kaki yang ada di Jalan Hr. Soebrantas Kota Pekanbaru tidak sepadat di kawasan perkotaan besar seperti kota metropolitan, namun tidak semua orang mempunyai kendaraan bermotor, sehingga mereka tersebut memiliki haknya atas trotoar. Sebuah peraturan dan kebijakan yang dibuat bukan hanya untuk dibuat tapi juga perlu adanya realisasi atau pelaksanaan serta penerapannya di lapangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Pustaka Al-Kautsar

Ambarwati, Lasmini, dkk. 2018. *Pejalan Kaki Riwayatmu Dulu dan Kini*, Cet ke-

1. Gedung INBIS

Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Prenadamedia Group

Kusmagi, Marye Agung. 2010. *Selamat Berkendaraan di Jalan Raya, Raih Asas Sukses*. Penebar Swadaya Grup

Margono. 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Michariman, Randi, Al-Djufri, Helmi. 2016. *Siyasah Kebangsaan: Analisis Siklus Seratus Tahun Bangsa Indonesia (1928-2028) dalam Perspektif Pemikiran Imam Al Ghazali dan Ibnu Khaldun*. Cet. 1. Jawa Tengah: Penulis Muda

Mhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Puungan, Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Ed. 1, Cet. 5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet.1. Banjarmasin: Antasari Press
- Ridwan. 2019. *FIQH POLITIK: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Cet. 1. Jakarta: AMZA
- Ruswandi, Agus. 2015. *Al-Islam II: Buku Daras Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)*. UNINUS BANDUNG
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Siyoto, Sandu dkk. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet.1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Soeknato, Soerjono, dkk. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers
- Syukur, Abdullah. 1998. *Kumpulan Makalah, "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dalam Pembangunan"*. Persadi: Ujung Padang
- Ti Redaksi. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Yusuf, Muri. 2018. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet.4. Jakarta: KENCANA
- Undang-Undang/ Peraturan**
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Perencanaan Jalur Pejalan Kaki pada Jalan Umum No.032/T/BM/1999



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Penjelasan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 56 Tahun 2019 tentang Masterplan Pekanbaru Smart City
- PERMEN Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan
- Petunjuk Perencanaan Trotoar, *Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembinaan Jalan Kota* NO. 007/T/BNKT/1990
- Standard Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan, *Direktorat Jenderal Bina Marga-Direktorat Pembinaan Jalan Kota*, Maret 1992
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Jurnal**
- Dalimunthe, Nur Mawan. 2019. *Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Menangani Anak Jalanan*, Skripsi Administrasi Negara, 2019, hlm. 35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Darmawati. 2008. *Determinasi Renstrasi Penduduk di Kota pekanbaru*, Jurnal Vol. VIII, No.2, hlm. 61-71
- Pratama, Novalino. 2014. *Studi Perencanaan Trotoar di Dalam Lingkungan Kampus Universitas Sriwijaya Inderalaya*, Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, Vol. 2, No. 2, Juni 2014, hlm. 274
- Setiawan, Moch Fathoni. 2011. *Studi Perilaku Pejalan Kaki Pada Trotoar (Pedestrian Ways) DI Surakarta Ditinjau Dari Kenyamanan Iklim*, Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan, No. 2 Vol. 13 Juli 2011, hlm. 185
- Silva, Hendri. 2015. *Identifikasi Arsitektur Melayu di Kota Pekanbaru*. Jurnal Arsitektur, No. 1, Vol. 2, Januari 2015, hlm. 3-4
- Susilo, Ariesta Ridlo Ayu. Jurnal
- Wibawa, Baju Arie, dkk. *Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula (Evaluasi Jalur Pejalan Kaki DI Kota Semarang Menurut Permen PU 03/PRT/M/2014*, Skripsi Teknik Arsitektur, hlm. 3

**WEB/ Situs**

- Badan Pusat Statistik, Kota Pekanbaru Dalam Angka 2019, dari <https://pekanbarukota.bps.go.id> diakses, pada tanggal 14 April 2021, pukul 15:24 WIB
- Dikutip dari <http://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-danangkutan-jalan-di-indonesia/> di akses pada tanggal 5 februari 2021
- Dikutip dari <http://www.bantuanhukum.or.id/web/blog/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raja/> diakses pada tanggal 5 februari 2021



## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN





- Hak Cipta
1. Dila
  2. Dila

© H:



JIN Suska Riau.  
tau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinjauan suatu masalah.

n Syarif Kasim Riau



## WAWANCARA PENELITIAN DENGAN ANGGOTA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU

1. Wawancara dengan Bapak Teza Darsa M.Eng selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga



2. Wawancara dengan Bapak Fadli S.T selaku Staff Bidang Bina Marga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak

## DOKUMENTASI LOKASI PENELITIAN

1. Dilaran
  - a. Peni
  - b. Peni
2. Dilaran



## DAFTAR WAWANCARA

A Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau

1. Apa pengertian trotoar?
2. Seberapa pentingkah keberadaan sebuah trotoar?
3. Apakah pemerintah sudah melaksanakan untuk menyediakan fasilitas berupa trotoar yang sesuai dengan apa yang berada pada pasal 45 ayat 2?
4. Sejauh mana pemerintah melaksanakan UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 terhadap penyediaan/ pembangunan jalur pejalan kaki berupa trotoar di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru?
5. Bagaimana kondisi jalur pejalan kaki (trotoar) di Jalan HR. Soebrantas? Apakah sudah memenuhi standart keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki?
6. Apakah ada upaya atau program pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyediakan akses bagi pejalan kaki (trotoar) di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru?
7. Bagaimana konsep dan pelaksanaan pembangunan jalur pejalan kaki (trotoar) berdasarkan UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru?
8. Apa faktor penghambat yang dihadapi dalam penerapan atau pelaksanaan UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 Pasal 45 mengenai penyediaan atau pembangunan jalur pejalan kaki (trotoar) di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru?
9. Adakah alokasi anggaran yang dikhususkan untuk penyediaan/ pembangunan jalur pejalan kaki (trotoar) di Jalan HR. Soebrantas?
10. Pihak mana saja yang terkait dalam pelaksanaan UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 terkait pembangunan/ penyediaan jalur pejalan kaki trotoar di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B Pejalan Kaki**

1. Bagaimana pendapat anda sebagai pejalan kaki tentang jalur pejalan kaki (trotoar) yang ada di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru?
2. Apakah fasilitas yang tersedia sudah layak dan memenuhi standart?
3. Apakah menurut anda pejalan kaki sudah mendapatkan haknya dalam menggunakan fasilitas pejalan kaki berupa trotoar?
4. Bagaimana pendapat anda sebagai pejalan kaki tentang tindakan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah terkait dalam penyediaan dan pembangunan jalur pejalan kaki (trotoar) di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru?
5. Bagaimana pendapat anda sebagai pejalan kaki tentang banyaknya pedagang kaki lima yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan?





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (*Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki*)” yang ditulis oleh :

Nama : **DILA ARTIKA SARI**  
 NIM : 11720424761  
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Juni 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua

**Firdaus, SH., MH**

Sekretaris

**Musrifah, SH., MH**

Penguji I

**Dr. Alpi Syahrin, SH.,MH**

Penguji II

**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Penelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : DILA ARTIKA SARI

**NIM** : 11720424761

**FURUSAN** : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

**JUDUL** : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA  
PEKANBARU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (*Studi Pembangunan  
Jalur Pejalan Kaki*)

Pembimbing: Haswir, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Juli 2021

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL  
NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptanya milik UIN Suska Riau

Diilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI PEMBANGUNAN JALUR PEJALAN KAKI) ditulis oleh saudara :

Nama : Dila Artika Sari  
NIM : 11720424761  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dibuatkan pada :  
Hari / Tanggal : Kamis, 15 Oktober 2020  
Narasumber : Dr. H. Hajar M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
as Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,  
Narasumber

**Jalinus, S.Ag.**  
NIP. 19750801 200701 1 023

**Dr. H. Hajar M.Ag**  
NIP.19580712 198603 1 005

© Halk cipta mlk UIN 2535 RAU

Sultan Syarif Kasim Riau State Islamic University

## Diindungi Undang-Undang

Number:

**Jalinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023

2. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. <sup>1</sup>

3. <sup>2</sup> Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. <sup>3</sup> Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كافة الشريعة و القانون**  
**FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 01 Februari 2021

Un. 04/F.I/PP.00.9/1587/2021

Bersa  
 : 1 (Satu) Proposal  
 : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: DILA ARTIKA SARI
NIM	: 11720424761
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI PEMBANGUNAN JALUR PEJALAN KAKI).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN SUSKA RIAU  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/295/2021



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/38275 tanggal 2 Februari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | DILA ARTIKA SARI  |
| 2. NIM               | : | 11720424761   |
| 3. Fakultas          | : | SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  |
| 4. Jurusan           | : | HUKUM TATA NEGARA   |
| 5. Jenjang           | : | S1  |
| 6. Alamat            | : | LERENG JORONG BABUKIK KEL. KAMANG MUDIAK KEC. KAMANG MAGEK KAB. AGAM-SUMATERA BARAT   |
| 7. Judul Penelitian  | : | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALUI LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI PEMBANGUNAN JALUR PEJALAN KAKI) |
| 8. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU<br>2. KANTOR KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU  |

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 2 Februari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru



**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

### Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Dasar Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Menimbang

1. Nama  
2. NIM  
3. Fakultas  
4. Jurusan  
5. Jenjang  
6. Alamat

7. Judul Penelitian

8. Lokasi Penelitian

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 2 Februari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru



**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

### Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU KECAMATAN BINAWIDYA

ALAMAT : JALAN H.R SUBRANTAS NO.52 TELP. (0761) 63317  
PEKANBARU

Pekanbaru, 4 Maret 2021

Kepada  
Yth. 1. Kecamatan Binawidya

Di -  
Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: 400/KBW-KESSOS/07/2021  
: Biasa  
: -  
: Izin Riset / Penelitian

Berkenaan dengan Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor: 071/BKBP-SKP/295/2021 tanggal 2 Februari 2021, maka bersama ini Kami minta Saudara kiranya dapat memfasilitasi dan membantu kelancaran penelitian:

Nama : **DILA ARTIKA SARI**  
NIM : 11720424761  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA  
Jenjang : S1  
Judul Penelitian : **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU DI  
TINJAU DARI FIQH SIYASAH ( STUDI  
PEMBANGUNAN JALUR PEJALAN KAKI) “**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih



CAMAT BINAWIDYA

**EDI SUHERMAN, S.Sos., M.Si**

Peny. Pk. I

NIP. 19751109 200701 1 002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/38275  
TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 00.04/11/PP.00.9/1587/2021 Tanggal 1 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **DILA ARTIKA SARI**  
NIM / KTP : **11720424761**  
Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**  
Jenjang : **S1**  
Alamat : **PEKANBARU**  
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI PEMBANGUNAN JALUR PEJALAN KAKI)**  
Lokasi Penelitian : **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

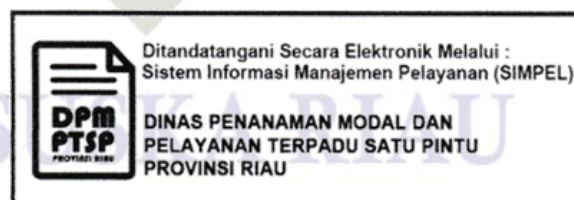
Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Ketentuan pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 2 Februari 2021



### Revisi :

### Ditandatangani Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
2. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,**  
**KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU**

Jalan SM. Amin No. 92 Telp. (0761) 564550 - 564535 - 564541 Fax. (0761) 564547 - 564407  
PEKANBARU - 28292

Pekanbaru, 4 Maret 2021

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah Dan  
Hukum UIN Suska Riau  
di -

Pekanbaru

Biasa

Permohonan Izin Riset


Sehubungan dengan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/38275 pada Tanggal 02 Februari 2021, perihal permohonan Izin Riset atas nama :

Nama : DILA ARTIKA SARI  
NIM : 11720424761  
Prodi Studi : Hukum Tata negara  
Judul Penelitian : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota  
ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Pembangunan  
Jalur Pejalan Kaki)

Kami sampaikan bahwa kami tidak keberatan menerima mahasiswa diatas untuk melakukan Riset pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Provinsi Riau.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan  
Terimakasih

a.n. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN  
RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU  
SEKRETARIS,

  
Ir. ALI SUBAGYO, MT  
Pembina Tk. II

NIP. 19660128 199703 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,**  
**KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU**

Jalan SM. Amin No. 92 Telp. (0761) 564550 - 564535 - 564541 Fax. (0761) 564547 - 564407  
PEKANBARU - 28292

**NOTA – DINAS**

Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,  
Kawasan Perumahan dan Pertanahan Provinsi Riau  
Kepada : Kepala Bidang Bina Marga  
Nomor : 423-9/ND/PUUPKPP-Sekre/11/2021/0813  
Tanggal : 5 Maret 2021  
Hal : Permohonan Izin Riset

Sehubungan dengan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38275 pada Tanggal 02 Februari 2021, perihal permohonan Izin Riset atas nama :

Nama : DILA ARTIKA SARI

NIM : 11720424761

Prodi Studi : Hukum Tata negara

Judul Penelitian : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki)

Demikian disampaikan agar saudara maklum, atas bantuan serta kesediaannya diucapkan terimakasih.

a.n. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN  
RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU  
SEKRETARIS,

  
Ir. ALI SUBAGYO, MT  
Pembina TK. I

NIP. 19660128 199703 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Babukik, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 06 April 1999 dari pasangan suami istri Bapak Amri dengan Ibu Murniati yang diberi nama **“DILA ARTIKA SARI”** yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Riwayat pendidikan penulis, pada tahun 2005 sampai dengan 2010 penulis lulus dari SD Negeri 05 Tarusan.

Pada Tahun 2011 sampai dengan 2013 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tilatang Kamang, dan pada tahun 2017 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Tilatang Kamang.

Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikannya di salah satu Universitas Islam Negeri yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi S1 Hukum Tata Negara (Siyasah). Selama menjadi mahasiswa UIN SUSKA RIAU, penulis juga mengikuti organisasi, baik itu organisasi internal maupun organisasi eksternal.

Selanjutnya pada tahun 2019, penulis melakukan kegiatan magang di Pengadilan Agama Kelas II B di Kota Bukittinggi. Setelah itu, penulis melanjutkan Kuliah Kerja Nyata Daring (KKN-DR) di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 28 Juni 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi **“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki) dengan prediket Cum Laude**